

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari proses implementasi kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah Kota Blitar dengan menerapkan enam indikator sasaran kebijakan, dukungan sumber daya, koordinasi organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi ekonomi, dan disposisi implementator secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik.

Namun terdapat beberapa hambatan dalam proses implementasi kebijakan penyerahan PSU yaitu :

1. Masalah komunikasi dan koordinasi antar lembaga
2. Proses administrasi yang lamban
3. Keterbatasan sumber daya
4. Kurangnya pelatihan teknis pelaksana lapangan

5.2 Saran

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dari pengembang kepada pemerintah daerah Kota Blitar, peneliti memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Diperlukan rapat koordinasi yang intensif untuk menyamakan persepsi dan memastikan bahwa semua pihak secara jelas memahami tugas dan tanggung jawabnya.
2. Mempercepat proses sertifikasi dan pengurusan dokumen seperti sertifikat prasarana, sarana, dan utilitas dengan memperbaiki sistem administrasi dan mendefinisikan tanggung jawab masing-masing pihak.
3. Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan anggaran di instansi terkait untuk membantu setiap langkah dalam proses penyerahan, dari verifikasi dokumen hingga sertifikasi.
4. Memberi pelaksana lapangan pelatihan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan, prosedur, dan pentingnya mematuhi peraturan dan pelayanan publik.